

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan Nasional telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan. Karena itu dalam penerimaan siswa, tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial dan tingkat ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan, seperti halnya SMK (Sekolah Menengah Kejuruan yang khusus untuk siswa perempuan) yang dulu bernama SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri).

Agar pendidikan mempunyai nilai bagi kaum perempuan, pendidikan tersebut harus merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran kaum perempuan tentang struktur yang menindas, yang menahan mereka dalam posisi tidak berdaya. Di sisi lain sebagian besar sistem pendidikan yang ada tidak menyediakan iklim untuk menumbuhkan kesadaran akan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan (dalam fungsifungsi yang dapat dipertukarkan). Dalam masyarakat yang sedang berkembang, sebagian besar perempuan yang berpendidikan, termasuk di dalamnya para pemimpin, kaum akademisi maupun kaum profesional dalam organisasi yang sudah melembaga, justru melestarikan status quo tersebut. Karena itu untuk mengatasi hal ini diperlukan sistem pendidikan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk mensosialisasikan gender (kesetaraan perempuan dengan laki-laki) kepada masyarakat luas.

Gender bersifat relatif dan dinamis. Gender yang dikonstruksikan secara sosial-budaya merupakan dualitas tempat dan waktu yang diciptakan masyarakat yang mengatur laki-laki dan perempuan dalam berbicara, bertindak, bercita-cita atau merasakan sesuatu. Oleh karena itu antara masyarakat yang satu dan yang lain atau dalam satu masyarakat pada kurun waktu yang berbeda sangat mungkin memiliki konstruksi gender yang berbeda sebab gender berubah mengikuti dinamika dan “keinginan” masyarakat pendukungnya.

Harapan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan akan mewarnai bagaimana nilai-nilai gender yang disosialisasikan kepada anak. Masyarakat dalam konstruksi budaya yang patriarkhi menempatkan posisi seks dalam struktur sosial, sehingga peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin dijadikan dasar pembangunan struktur sosial. Stratifikasi sosial didasarkan pada stratifikasi seks. Laki-laki diperlakukan lebih penting daripada perempuan. Relasi antara laki-laki dengan perempuan tidak setara. Nilai gender yang patriarkhi ini terus diajarkan dan ditegaskan berulang-ulang secara terus-menerus, sehingga realitas objektivitasnya semakin kuat. Nilai-nilai ini dianggap sebagai kebenaran ideologis yang tidak bisa diingkari (hegemoni) dan memiliki daya paksa.

Persoalan ketidakadilan gender merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan masyarakat yang di dalamnya ada dua belah pihak yang terlibat laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, perlu diupayakan secara terus menerus langkah-langkah untuk mengantisipasi dan

meminimalkannya. Secara internasional pada konferensi wanita sedunia di Beijing (1995) masyarakat dunia menyepakati komitmen bersama untuk menghapuskan ketidakadilan gender ini.

Konferensi dunia tentang perempuan tahun 1995 di Beijing telah mengidentifikasi banyak kesenjangan gender dalam pendidikan. Seperti partisipasi sekolah, angka buta huruf perempuan yang cukup tinggi, rendahnya keterampilan perempuan dalam penguasaan teknologi, kurikulum, dan buku-buku pegangan yang bias gender. Seringkali tidak disadari bahwa kesenjangan gender yang terjadi dalam pendidikan secara tidak langsung berakibat pada kondisi, status, dan posisi perempuan di dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Tingginya kematian ibu misalnya, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pendidikan perempuan dan tidak adanya materi pendidikan yang mengajarkan kesehatan reproduksi kepada calon suami-istri.

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender, pemerintah Indonesia melalui politik hukumnya dalam GBHN 1999 menetapkan bahwa pengarusutamaan gender menjadi kebijakan nasional yang cukup penting dan harus diimplementasikan dalam setiap bidang kegiatan pembangunan. Secara vertikal kebijakan hukum ini diturunkan dalam instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional merupakan upaya

pemerintah dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Propinsi Jateng dalam kurun waktu 2004-2008 telah melakukan PUG Bidang pendidikan melalui strategi pengembangan model pendidikan berprespektif gender pada jalur dan jenjang pendidikan. Metode yang digunakan dengan cara mengimplementasikan prespektif gender ke dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) dengan memfungsikan pendidik sebagai vocal point (fasilitator). Mengakomodasi dinamika yang berkembang dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan PUG: Peraturan Mendiknas No. 84/2008 tentang Pedoman pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana otonomi pendidikan di tingkat Provinsi mengimplementasikan kebijakan hukum tersebut melalui program piloting atau rintisan model pendidikan berspektif gender di semua jenjang dan jalur pendidikan sejak tahun 2004. Khusus di bidang pendidikan, ide untuk melaksanakan program ini merupakan wujud kepedulian dan kepekaan pemerintah dalam merombak kondisi sosial masyarakat sekaligus mengambil peran yang cukup penting dalam proses perubahan kondisi sosial yang berciri

patriarkat. Patriarkat atau patriarki adalah system social yang sangat mementingkan dari segi keturunan misalnya nama memakai nama orang tua/bapak, waris lebih memperhatikan anak laki-laki, dan penguasa dan pengambil keputusan pada pihak laki-laki.

Kesenjangan gender yang terjadi dalam dunia pendidikan meliputi berbagai hal, seperti persoalan akses dan partisipasi sekolah, kurikulum dan muatan buku pelajaran yang bias gender, feminisasi pendidikan, dan lain-lain. Akses dan partisipasi dalam pendidikan misalnya, angka partisipasi kasar (APK) tahun 2002 untuk pendidikan SMA, anak perempuan 47,19% dan anak laki-laki 49,62% indeks partisipasinya 0,95. Angka drop out (DO) untuk anak SMP misalnya untuk anak perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 0,88% : 0,37%.

Perbedaan rata-rata lama sekolah anak perempuan dan laki-laki cukup besar karena rata-rata lama sekolah anak perempuan di Jawa tengah berdasarkan data Susenas tahun 2001 hanya 4-6, 7 tahun, dan rata-rata lama sekolah paling tinggi yaitu di atas 8 tahun berada di Kota Salatiga. Sementara itu, persentase buta huruf perempuan di Jawa Tengah berdasarkan data Susenas 2002 berkisar pada kurang lebih 20%. Namun, terdapat beberapa kabupaten yang persentase buta hurufnya lebih dari 20% bahkan mendekati 30% seperti Kabupaten Karanganyar, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

Faktor kesenjangan gender dalam pendidikan banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang hidup di dalam masyarakat. Faktor sosial budaya menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena

berakhir ke dapur juga. Bagi anak laki-laki, secara sosial budaya dikonstruksikan sebagai penyangga ekonomi keluarga sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk ikut membantu meringankan beban ekonomi keluarga sehingga merekalah yang lebih diutamakan untuk sekolah.

Faktor sosial budaya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga di mana dengan pendapatan yang terbatas keluarga diharapkan pada pilihan sulit untuk menentukan siapa yang harus tetap bersekolah. Biasanya dalam pengambilan keputusan tersebut anak laki-laki akan lebih diprioritaskan. Faktor ekonomi seringkali juga menjadi penyebab orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya jika tempat sekolah yang dituju berada jauh di luar desa dan harus menggunakan transportasi seperti fasilitas pendidikan SMP, SMA, sehingga faktor jarak dan keterjangkauan fasilitas menjadi kendala yang berikutnya.

Isu gender lainnya dalam dunia pendidikan adalah persoalan bias gender dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, Sekolah Kejuruan, dan Keaksaraan Fungsional. Hal itu ditemukan pada mata pelajaran Matematika, IPS, IPA, Kesehatan dan Jasmani, PKn, Bahasa Indonesia. Bahkan dapat dilihat dari porsi pengarangnya ternyata lebih banyak pengarang laki-laki dibandingkan dengan pengarang perempuan. Namun, pengarang perempuan pun belum menjamin bahwa buku yang dikarangnya mempunyai perspektif gender.

Desakan untuk mengubah kurikulum dan bahan ajar agar lebih peka gender dinilai sangat mahal dan memerlukan waktu lama. Oleh karena itu,

perlu dilakukan berbagai upaya terobosan untuk mengurangi bias gender dalam materi pelajaran di berbagai tingkatan pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan model pendidikan peka gender.

Gender harus disosialisasikan kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Melalui sosialisasi nilai yang dilakukan anak mempelajari nilai-nilai dan peran-peran sosial yang merefleksikan ideologi yang sedang berlaku di masyarakat. Proses ini telah dimulai sejak anak belum bersekolah, sehingga ketika anak pertama kali memasuki bangku sekolah ia telah memiliki pemahaman awal tentang suatu nilai. Sebelum sekolah, anak telah lebih dahulu mempelajari nilai gender di rumahnya melalui peran yang dijalankan orangtuanya. Oleh karena itu selanjutnya sekolah dapat bertindak sebagai penguat atau pendekonstruksi pemahaman awal tersebut.

Model ini tidak berdiri sendiri menjadi sebuah mata pelajaran di luar mata pelajaran yang sudah ada, tetapi melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam setiap mata pelajaran dan metode pembelajaran. Demikian halnya yang dilakukan oleh guru SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang. Guru mengintegrasikan perspektif gender salah satunya dalam mata pelajaran IPS. Hal tersebut semakin diperkuat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung pengintegrasian perspektif gender dalam mata pelajaran IPS.

Mata pelajaran IPS ditujukan bagi pembinaan generasi penerus usia dini agar memahami potensi dan peran dirinya dalam berbagai tata

kehidupannya, menghayati keharusan dan pentingnya bermasyarakat dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta mahir berperan di lingkungannya sebagai insan sosial dan warga negara yang baik. Dalam masyarakat pada umumnya bersifat kompleks dan tidak dapat dipahami dengan pandangan satu segi saja. Dengan IPS problem tersebut dapat dipahami dari berbagai segi yaitu dari segi geografi, sejarah, antropologi, dan sebagainya.

Mata pelajaran IPS dapat dijadikan sarana bagi setiap pelajar untuk mengubah kepribadian kearah yang lebih baik serta dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Mata pelajaran IPS menuntut siswa untuk menunjukkan sikap yang baik, kreatif, dan bertanggung jawab. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran belum tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar-mengajar, adalah pengelolaan pembelajaran. Dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran perlu dilandasi dengan pandangan sistematis terhadap kegiatan belajar-mengajar, yang juga harus didukung dengan upaya dalam pengelolan pembelajaran. Di mana dalam pengelolaan pembelajaran diuraikan tahap-tahap dalam pembelajaran.

Pembelajaran ini dilaksanakan oleh guru kepada anak-anak dan berlangsung sepanjang waktu. Harapan guru siswa perlu ditekankan untuk aktif di dalam kelas dan aktif untuk bertanya sehingga ada interaksi antara guru dengan siswa yang menunjukkan kegiatan pembelajaran dapat berjalan



lancar untuk mencapai tujuan dengan keberhasilan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang masalah pengelolaan pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana ciri-ciri pengelolaan pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang? Fokus terbagi menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimana ciri-ciri materi pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang?
2. Bagaimana ciri-ciri metode pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang?
3. Bagaimana ciri-ciri interaksi pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan ciri-ciri materi pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri metode pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang.

3. Mendeskripsikan ciri-ciri interaksi pembelajaran IPS berperspektif gender di SD Negeri Jurangombo 4 Kota Magelang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Membantu menyediakan informasi ilmiah mengenai alternatif pembelajaran IPS berperspektif gender.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori strategi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan pembelajaran secara umum dan dalam mata pelajaran IPS secara khusus.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran IPS berperspektif gender.
  - b. Sebagai masukan bagi siswa itu sendiri untuk lebih dapat memahami tentang pentingnya gender dalam pendidikan dan untuk meningkatkan hasil belajar.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Materi pembelajaran merupakan sekumpulan bahan ajar yang dirancang dan disusun oleh guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran.

2. Metode pembelajaran adalah strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa.
3. Interaksi pembelajaran suatu hubungan timbal balik antara guru dan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.